

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

Suwanti

evisuwanti1@gmail.com

Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of accountability, transparency, and government financial performance on the local government apparatus performance, especially in Sidoarjo district. The research was quantitative. While, the data collection technique used probability sampling. Meanwhile, the sampling technique used simple random sampling. This research uses a sample of village officials in several village offices located in Sidoarjo Regency. In line with, there were 150 respondents on 30 villages, from 10 sub-districts in Sidoarjo district; as sample. Moreover, the data were primary with questionnaires as the instrument. Furthermore, the data analysis technique used PLS (Partial Least Square) with Smart PLS 0.3. The research result concluded accountability had positive and significant effect on the local government apparatus performance. Likewise, government financial performance had positive and significant effect on the local government apparatus performance, especially in Sidoarjo district. In addition, accountability had positive and significant effect on the government financial performance. Likewise, transparency had positive and significant effect on the government financial performance, especially in Sidoarjo district. On the other hand, transparency had positive but insignificant effect on the local government apparatus performance, especially in Sidoarjo district.

Keywords: accountability, transparency, government financial performance, government performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan pemerintah terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, khususnya pada kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan beberapa sampel perangkat desa di beberapa kantor desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 150 responden yang berada di 30 wilayah desa dari 10 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*) melalui *Software Smart PLS* versi 0.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Kemudian akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

Katakunci: akuntabilitas, transparansi, kinerja keuangan pemerintah, kinerja pemerintah.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan

fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah desa dituntut harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sebagai perwakilan abdi dari masyarakat aparat pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat. Dengan fungsi gandanya tersebut diharapkan aparat pemerintah desa mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya dengan cara menunjukkan hasil dari kinerjanya.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, meskipun keinginan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan yang diberikan secara umum masih berbelit-belit dengan berbagai alasan. Aparatur desa dianggap masih kurang efisien dalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang kurang inisiatif, kurang bisa bekerja sama dan kurang tepat waktu. Hal ini membutuhkan kinerja yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen tanggung jawab mereka.

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dipandang kurang aspiratif, kurang responsif, kurang akuntabel, dan pandangan negatif lainnya yang berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat Pemerintah Desa. Sementara, masyarakat tidak mungkin menolak semua keharusan yang berhubungan dengan Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah. Kritik masyarakat pada umumnya bermula pada penilaian bahwa aparat Pemerintah Desa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sikap kritis masyarakat ini semakin kuat seiring dengan munculnya kecurigaan, kecemburuan sosial, konflik horisontal, dan protes masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pembagian tugas.

Kinerja para aparat pemerintah desa juga tidak semuanya dipandang dan dianggap buruk, kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang peran dan fungsi Pemerintah Desa, ketidaktahuan tentang program Pemerintah Desa, dan ketidaktahuan tentang kebutuhan mereka berkaitan dengan Pemerintah telah menjadikan warga masyarakat tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas-tugas yang telah dijalankan oleh para Pemerintah Desa. *Good corporate governance* merupakan salah satu tujuan utama dari sektor publik, karena untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan salah satu unsur yang harus dipenuhi yaitu dengan adanya suatu komitmen bersama dari semua anggota dalam satuan organisasi untuk mewujudkan suatu fungsi dan tugas pemerintahan yang berkualitas, mengedepankan seluruh unsur-unsur dari efektivitas, efisien, ekonomis dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci utama bagi terwujudnya *good corporate governance*. Akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas seluruh kegiatan/program dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut yang dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik (Mahsun, 2006: 83).

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai salah satu dari bentuk pertanggungjawaban kegiatan/program yang telah diambil dalam rangka untuk melaksanakan misi dan tercapainya visi yang sekaligus digunakan sebagai alat pemacu peningkatan kinerja. Guna mewujudkan suatu hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dimaksud dalam Peraturan Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan bahwa seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Terjadi peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat (Saputra, *et al.*, 2014). Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di pemerintahan maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja pemerintah dapat lebih baik lagi (Auditya dan Lismawati, 2013).

Ragamnya metode pengukuran kinerja tersebut menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas instansi pemerintah, lebih khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah merupakan informasi yang paling penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah telah benar-benar menggambarkan kondisi riil tanpa manipulasi, maka diperlukan jasa auditor yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut menjadi sedikit berbeda mana kala diterapkan pada laporan keuangan Desa.

Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu dari penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur adalah daerah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kabupaten Sidoarjo itu sendiri termasuk dalam golongan kawasan Gerbang Kartosusila. Unit pemerintahan yang dikoordinir secara langsung oleh Kabupaten Sidoarjo adalah kecamatan, dalam masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa atau kelurahan, Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan yang telah terbagi atas 322 wilayah desa dengan total penduduk tahun 2019 mencapai 2.262.440 dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 1.140.697 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.121.813 jiwa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa? (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa? (3) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah? (4) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah? (5) Apakah kinerja keuangan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?.

Tujuan penelitian menyampaikan keinginan dari peneliti agar memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian yang telah diajukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang akan dilakukan dan dicapai peneliti adalah untuk menguji pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, kinerja keuangan pemerintah terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang

dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail *et al.*, 2016).

Sehingga, kesimpulan dari *agency theory* merupakan teori yang melibatkan antara dua pihak (*agent* dan *principal*), dimana pihak *principal* membuat suatu kontrak kerja dengan pihak lain (*agent*) yang diharapkan mampu menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* adalah sebuah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak lagi termotivasi oleh tujuan-tujuan dari individu, melainkan lebih mengarah pada sasaran hasil utaran mereka yang digunakan untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi pada sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya sebuah hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi memaksimalkan utilitas kelompok *principal* dan *agent*, memaksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson dan Davis, 1991).

Kesimpulannya yaitu bahwa teori *stewardship* dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai salah satu lembaga pemerintah yang dapat dipercaya menampung aspirasi masyarakat, dapat juga memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah diamanahkan kepadanya, sehingga terciptanya tujuan dari ekonomi yang terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Pengukuran kinerja dalam sebuah organisasi pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Tiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun, pelaporan ini lebih memfokuskan pada *input* (masukan) seperti jumlah tenaga, dana, dan lain-lain. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, program/kegiatan dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya meliputi tahapan sebagai berikut: a) Penetapan rencana strategis, b) Pengukuran kinerja, c) Pelaporan kinerja, d) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sehingga terwujudnya proses pencapaian tujuan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pemerintah desa harus mampu menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai badan usaha (*corporate values*), dan strategi badan usaha. Kepala Pemerintah desa juga harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

Akuntabilitas publik hanya dikenal di negara yang menerima konsep-konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan elemen terpenting dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bentuk perwujudan atas kewajiban suatu instansi pemerintah yaitu dengan mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dipercayakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja dan laporan keuangan pemerintah yang telah disusun secara periodik.

Transparansi

Transparansi adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak -pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Nico (2007:20) Transparansi adalah Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, disamping itu menjadi tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi dari masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk dapat mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah (*principal*). Dubnick (2005) menjelaskan bahwa dalam berbagai proses perkembangan dan perubahan suatu organisasi, diasumsikan ketika akuntabilitas suatu organisasi itu baik, maka akan berpengaruh juga pada transparansinya dan secara tidak langsung akan memperbaiki kinerja organisasi tersebut. Setyaningrum (2016) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas pada Pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja anggaran tersebut.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Transparansi merupakan proses keterbukaan suatu informasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat sebagai suatu komitmen bentuk dari pertanggungjawaban. Keterbukaan informasi oleh para aparatur pemerintah secara memadai dan mudah dipahami dapat digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan. Setyaningrum (2016) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi informasi maka akan berpengaruh baik terhadap kinerja pemerintah.

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2015) akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas informasi maka akan berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan pemerintah.

H₃: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

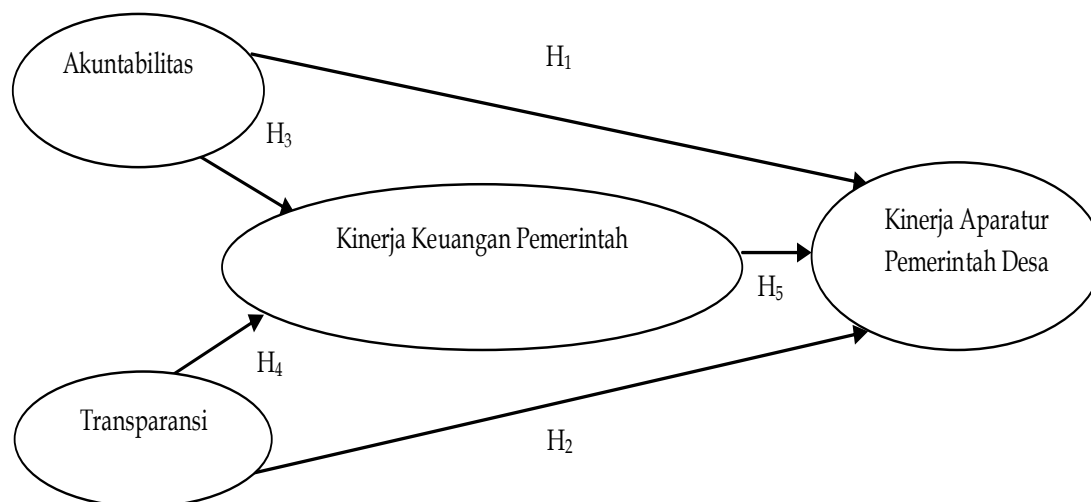
Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Nasution (2018) berpendapat bahwa Hasil hipotesis untuk variabel transparansi yaitu transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan artinya apabila transparansi sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan dapat menaikkan kinerja keuangan pemerintah.

H₄: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Pemerintah dapat dikatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. (Maryati, *et al.*, 2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah berpengaruh parsial atau positif serta signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi informasi maka akan berpengaruh baik terhadap kinerja pemerintah.

H₅: Kinerja Keuangan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis, Populasi, dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan bentuk survei dalam pengambilan datanya. Penelitian ini mengukur pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan pemerintah terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sidoarjo, peneliti mengambil wilayah desa secara acak sebanyak 30 desa dari 10 kecamatan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* atau biasanya disebut dengan pengambilan sampel secara acak dengan teknik yang digunakan adalah *simple random sampling* (teknik acak secara sederhana). Jumlah dari anggota sampel total dapat ditentukan dengan melalui rumus *Slovin*. Populasi penelitian ini terdapat 322 desa. Pada setiap kecamatan di penelitian ini, peneliti akan memberikan 5 kuisisioner. Sehingga populasi yang digunakan sebanyak 1.610 responden. Berikut ini adalah rumus beserta perhitungan dari rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah anggota sampel

N : Jumlah populasi

d² : Tingkat kepercayaan

Tingkat kepercayaan yang ditetapkan 10% atau 0,1

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari jawaban responden atas kuisisioner yang telah disebarkan/dibagikan. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuisisioner di 30 desa di Kabupaten Sidoarjo

yang dilakukan untuk mendapatkan opini terkait dengan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antar variable.

Jenis kuesioner yang digunakan didalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner tertutup berjenis skala yang dipakai yaitu skala *likert* 1 sampai 5, dengan kategori jawaban terdiri dari sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel dan Referensi	Definisi	Indikator	Skala
Kinerja Aparatur Pemerintah D esa (KAPD) (Mahoney, 2003)	Mereka yang bekerja di kantor kepala desa dalam rangka mem-berikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan.	1. Perencanaan. 2. Investigasi. 3. Pengkoordinasian. 4. Evaluasi. 5. Pengawasan. 6. Pemilihan staff. 7. Negoisasi. 8. Perwakilan. 9. Kinerja secara keseluruhan.	Skala <i>Likert</i>
Akuntabilitas (AKT) (Mahmudi, 2005)	Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan secara periodik.	1. Kejujuran dan hukum. 2. Manajerial. 3. Program. 4. Kebijakan. 5. Financial.	Skala <i>Likert</i>
Transparansi (TRS) (Krina, 2003)	Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.	1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggungjawab. 2. Kemudahan akses informasi. 3. Menyusun mekanisme pe- ngaduan jika ada peraturan yang dilanggar. 4. Meningkatkan arus informasi.	Skala <i>Likert</i>
Kinerja Keuangan Pemerintah (KKP) (Cavalluzzo dan Ittner, 2004)	Hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sesuai dengan angga-ran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.	1. Input. 2. Efisiensi operasional. 3. Kepuasan Masyarakat. 4. Standar kualitas pelayanan. 5. Dampak dari hasil yang dicapai.	Skala <i>Likert</i>

Sumber: Ghozali, 2009

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan persamaan dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berdasarkan varian atau komponen. PLS dikembangkan pertama kali oleh Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan variabel laten dengan

multiple indicator. Ghozali (2006) telah menjelaskan bahwa PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak diharuskan untuk mengasumsikan data dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. PLS juga digunakan untuk konfirmasi teori.

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tabel 2
Tabel Kriteria Evaluasi Model Pengukuran

Pengujian	Kriteria	Keterangan
<i>Convergent validity</i> (Validitas konvergen)	Hasil <i>loading factor</i>	Hasil <i>loading factor</i> setiap indikator >0,7 bisa dikatakan valid sebagai indikator yang mengukur konstruk.
	AVE	Nilai AVE > 0,5 membuktikan ukuran validitas konvergen yang baik
<i>Discriminant Validity</i>	<i>Cross Loading</i>	Korelasi antara konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar dibandingkan konstruk yang lain, maka konstruk laten mengindikasikan indikatornya lebih baik dari yang lain.
	<i>Square root of Average Variance Extracted (AVE)</i>	Nilai AVE harus diatas 0,5
<i>Internal Consistency Reliability</i>	<i>Composite Reliability</i>	Nilai <i>Composite reliability</i> harus diatas 0,6

Sumber: Ghozali, 2009

Convergent validity dari *outer model* dengan model dengan model reflektif indikator biasa dinilai dengan cara berdasarkan korelasi antara *construct score* dengan *item score* yang cara menghitungnya menggunakan PLS. Dapat dikatakan tinggi apabila ukuran reflektif berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang akan diukur. Untuk penelitian pada tahap awal dari ekspansi skala pengukuran nilai proses yaitu 0.5 sampai dengan 0,6 akan dianggap cukup (Ghozali, 2006).

Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 3
Tabel Kriteria Evaluasi Model Struktural

Pengujian	Kriteria	Keterangan
R2 untuk variabel laten Endogen	R2	Nilai R-square sebesar 0,67 mengindikasikan model baik, nilai 0,33 model moderat dan nilai 0,19 lemah.
Koefisien jalur	Uji P	P-Value lebih dari P-tabel bisa dikatakan signifikan.

Sumber: Ghozali, 2009

Model struktural (*inner model*) merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antara variabel laten. Menilai model dengan PLS didahului dengan melihat *R-square* dari setiap variabel laten dependen. Perubahan dari nilai *R-square* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dari variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif (Ghozali, 2006).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil wilayah desa yang akan diteliti secara acak sebanyak 30 desa dari 10 kecamatan yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. 10 kecamatan tersebut sudah mencakup dan mewakili wilayah bagian utara, barat, timur, selatan dari Kabupaten Sidoarjo karena sebelumnya peneliti telah mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: (1) Tentang seberapa jauh wilayah-wilayah tersebut untuk dapat dijangkau; (2) Waktu yang terbatas yang dimiliki oleh peneliti untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah tersebut; (3) Kondisi wilayah-wilayah tersebut mempunyai sumber daya manusia yang produktif.

Tabel 4
Tingkat Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang kembali	150	100%
Kuesioner yang gugur	0	0%
Kuisisioner yang dapat digunakan	150	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Jumlah total kuesioner yang dibagi/disebar yaitu sebanyak 150 kuesioner. Tingkat kuesioner yang kembali adalah 100% (150 kuesioner). Sedangkan tingkat kuesioner yang gugur adalah sebanyak 0% (0 kuesioner). Total kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 100% atau 150 kuesioner yang disebar.

Tabel 5
Karakteristik Responden

Profil Responden	Jumlah	Presentase
Jumlah sampel	150	100%
Jabatan:		
1. Sekretaris desa	30	20%
2. Kasi pemerintahan	30	20%
3. Kaur perencanaan	30	20%
4. Kaur TU dan umum	30	20%
5. Kaur keuangan	30	20%
Jumlah	150	100%
Jenis Kelamin:		
1. Laki-Laki	101	67%
2. Perempuan	49	33%
Jumlah	150	100%
Usia:		
1. ≤30 tahun	40	27%
2. 31-40 tahun	59	39%
3. 41-50	33	22%
4. > 50 tahun	18	12%
Jumlah	150	100%
Pendidikan:		
1. SMP	21	14%
2. SMA	80	53%
3. S1	42	28%
4. S2	7	5%
Jumlah	150	100%

Lama bekerja:		
1. < 2 tahun	24	16%
2. 2-5 tahun	30	20%
3. 6-10 tahun	39	26%
4. 11-15 tahun	36	24%
5. > 15 tahun	21	14%
Jumlah	150	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Jumlah responden perempuan lebih sedikit dibanding dengan responden laki-laki. Jumlah responden perempuan sebanyak 49 orang (33%) dan laki-laki sebanyak 101 orang (67%). Responden yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris desa sebanyak 30 orang responden (20%). 30 responden (20%) menjabat sebagai Kasi Pemerintahan. Kaur Perencanaan sebanyak 30 responden (20%). Kaur TU dan Umum 30 orang responden (20%). Sedangkan Kaur Keuangan sebanyak 30 responden (20%). Sebagian besar responden yang diteliti memiliki umur 31-40 tahun sebanyak 59 orang (39%), yang berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 40 orang (27%), 33 orang memiliki umur 41-50 tahun (22%), sedangkan yang lebih dari 50 tahun sebanyak 18 orang (12%). Responden berpendidikan SMP sebanyak 21 orang (14%), SMA 80 orang (53%) responden, 42 responden berpendidikan S1 (28%) dan hanya 7 orang (5%) yang berpendidikan S2. Lama bekerja para responden dapat dijelaskan yaitu kurang dari 2 tahun sebanyak 24 orang (16%), 2-5 tahun ada 30 orang (20%), 39 orang (26%) telah bekerja selama 6-10 tahun, 11-15 tahun berjumlah 36 orang (24%), dan lebih dari 15 tahun sebanyak 21 orang (14%).

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada hasil yang sudah diperoleh dari jawaban responden disetiap indikator pengukuran variabel.

Tabel 6
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKT	150	24	44	36,35	4,81
TRS	150	27	45	37,79	4,39
KKP	150	26	40	34,54	3,77
KAPD	150	28	45	38,25	4,44

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 diatas, Variabel Akuntabilitas (AKT) memiliki nilai minimal sebesar 24 dan nilai maksimal sebesar 44, serta memiliki nilai rata-rata sebesar 36,35 lebih tinggi dari nilai median (36) yang berarti bahwa akuntabilitas dari pemerintah desa secara umum memiliki akuntabilitas yang baik. Sedangkan nilai standart deviasinya sebesar 4,81.

Variabel Transparansi (TRS) mempunyai nilai minimal sebesar 27 dan nilai maksimal 45, serta memiliki nilai rata-rata sebesar 37,79 lebih rendah dari nilai median (38) yang berarti bahwa transparansi yang dimiliki oleh pemerintah desa memiliki transparansi yang cukup rendah. Sedangkan nilai standart deviasinya sebesar 4,39.

Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (KKP) memiliki nilai minimal sebesar 26 dan nilai maksimalnya sebesar 40, serta memiliki nilai rata-rata sebesar 34,54 lebih tinggi dari nilai median (34) yang berarti bahwa kinerja keuangan yang ada di pemerintah desa sudah berjalan dengan baik. Sedangkan nilai standart deviasinya sebesar 3,77.

Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (KAPD) mempunyai nilai minimal sebesar 28 dan nilai maksimal 45, serta memiliki nilai rata-rata sebesar 38,25 lebih tinggi dari nilai median (38) yang berarti bahwa kinerja aparatur pemerintah desa di pemerintah desa sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Sedangkan nilai standart deviasinya sebesar 4,44.

Menilai *Outer Model*

Untuk dapat menilai *outer model* ada tiga kriteria yang digunakan dalam menggunakan teknik analisa data dengan *SmartPLS* yaitu Validitas Konvergen (*Convergent Validity*), *Dicriminant Validity*, dan *Composite Reliability*.

Validitas Konvergen (*Convergent validity*)

Ukuran reflektif dikatakantinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006).

Tabel 7
Outer Loading

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>
Akuntabilitas	AKT.1	0.738
	AKT.2	0.694
	AKT.3	0.780
	AKT.4	0.717
	AKT.5	0.641
	AKT.6	0.645
	AKT.7	0.767
	AKT.8	0.779
	AKT.9	0.709
Transparansi	TRS.1	0.670
	TRS.2	0.739
	TRS.3	0.755
	TRS.4	0.840
	TRS.5	0.690
	TRS.6	0.676
	TRS.7	0.699
	TRS.8	0.729
	TRS.9	0.660
Kinerja Keuangan Pemerintah	KKP.1	0.766
	KKP.2	0.753
	KKP.3	0.734
	KKP.4	0.718
	KKP.5	0.692
	KKP.6	0.680
	KKP.7	0.702
	KKP.8	0.727
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	KAPD.1	0.684
	KAPD.2	0.760
	KAPD.3	0.753
	KAPD.4	0.715
	KAPD.5	0.694

KAPD.6	0.702
KAPD.7	0.691
KAPD.8	0.816
KAPD.9	0.700

Sumber: Data primer diolah, 2020

Discriminant validity

Uji dari *discriminant validity* menggunakan nilai dari *cross loading*. sebuah indikator akan dinyatakan memenuhi *discriminant validity* bila nilai dari *cross loading* indikator tersebut variabelnya adalah yang paling besar daripada variabel lainnya. Dari hasil yang sudah diperoleh, peneliti akan menyimpulkan jika dari setiap masing-masing indikator yang digunakan didalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang cukup baik.

Tabel 8
Cross Loading

Indikator	Variabel			
	AKT (X1)	TRS (X2)	KKP (X3)	KAPD (Y)
AKT.1	0.738	0.334	0.380	0.343
AKT.2	0.694	0.242	0.193	0.337
AKT.3	0.780	0.332	0.333	0.349
AKT.4	0.717	0.214	0.269	0.201
AKT.5	0.641	0.073	0.227	0.127
AKT.6	0.645	0.163	0.223	0.238
AKT.7	0.767	0.295	0.408	0.356
AKT.8	0.779	0.355	0.299	0.318
AKT.9	0.709	0.207	0.237	0.168
TRS.1	0.189	0.670	0.235	0.063
TRS.2	0.317	0.739	0.418	0.261
TRS.3	0.271	0.755	0.416	0.272
TRS.4	0.240	0.840	0.345	0.257
TRS.5	0.237	0.690	0.198	0.189
TRS.6	0.187	0.676	0.268	0.170
TRS.7	0.231	0.699	0.277	0.229
TRS.8	0.437	0.729	0.321	0.231
TRS.9	0.158	0.660	0.239	0.065
KKP.1	0.297	0.266	0.766	0.303
KKP.2	0.347	0.321	0.753	0.427
KKP.3	0.299	0.331	0.734	0.339
KKP.4	0.313	0.396	0.718	0.263
KKP.5	0.321	0.263	0.692	0.357
KKP.6	0.235	0.286	0.680	0.246
KKP.7	0.215	0.282	0.702	0.250
KKP.8	0.319	0.377	0.727	0.371
KAPD.1	0.302	0.242	0.217	0.684
KAPD.2	0.349	0.213	0.316	0.760
KAPD.3	0.275	0.226	0.349	0.753
KAPD.4	0.255	0.167	0.375	0.715
KAPD.5	0.232	0.190	0.340	0.694

KAPD.6	0.289	0.128	0.315	0.702
KAPD.7	0.306	0.282	0.304	0.691
KAPD.8	0.338	0.197	0.321	0.816
KAPD.9	0.240	0.238	0.394	0.700

Sumber: Data primer diolah, 2020

Selain itu, *discriminant validity* juga dapat dihitung dengan membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE). Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Tabel 9
AVE (Average Variant Extracted)

Variabel	AVE
Akuntabilitas (X1)	0,519
Transparansi (X2)	0,518
Kinerja Keuangan Pemerintah (X3)	0,521
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Y)	0,526

Sumber: Data primer diolah, 2020

Jadi, berdasarkan tabel diatas, nilai AVE dari variabel akuntabilitas, variabel transparansi, variabel kinerja keuangan pemerintah, dan variabel kinerja aparatur pemerintah desa memiliki nilai AVE yaitu memiliki masing-masing nilai AVE yang angkanya lebih dari 0,5 maka dinyatakan bahwa masing-masing dari variabel tersebut mempunyai *discriminant validity* yang baik.

Composite Relabity dan Cronbatch Alpha

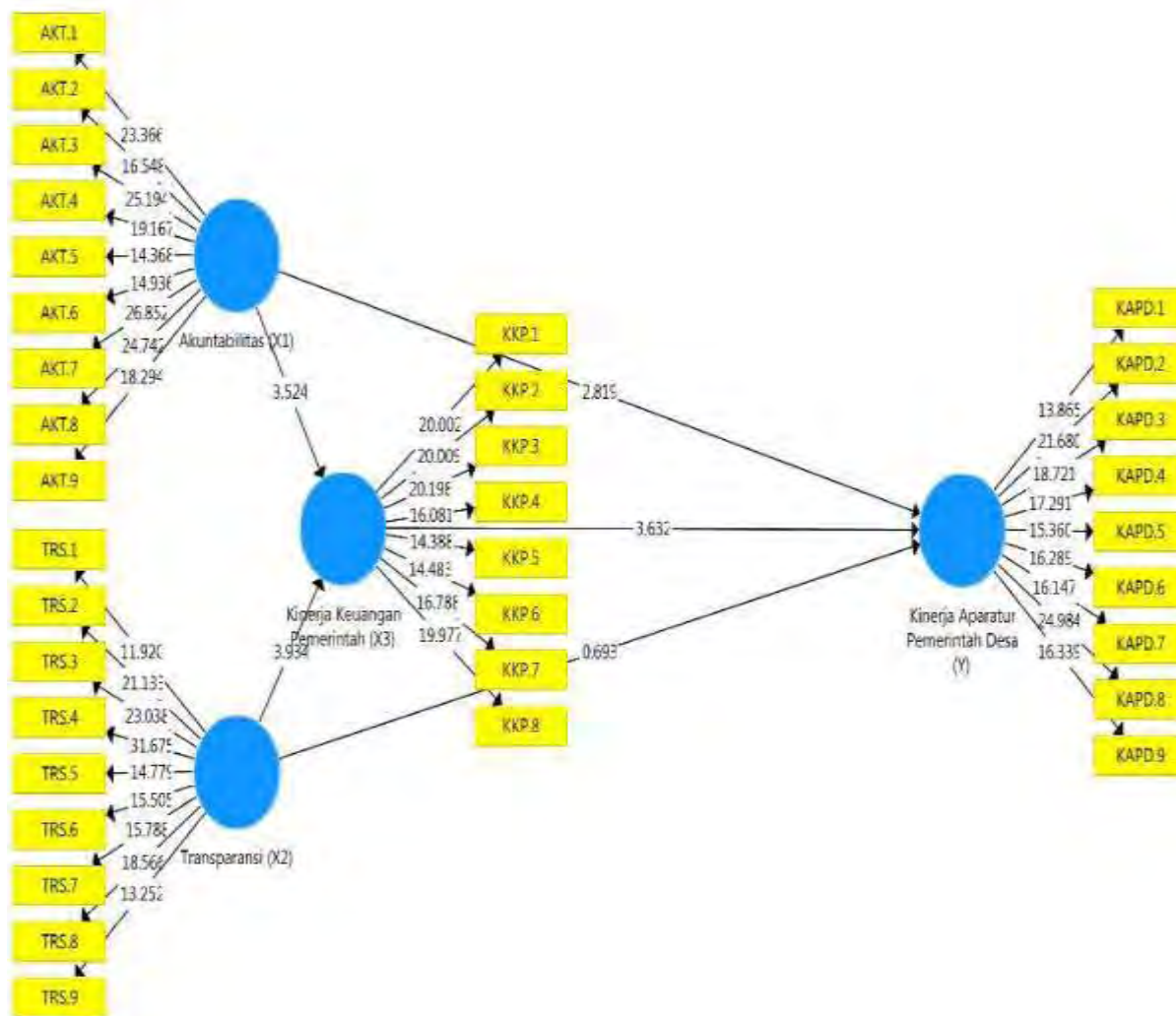
Composite Relabity merupakan uji dari nilai reliabilitas suatu indicator pada masing-masing variabel. *Composite Relabity* dapat dinyatakan baik atau memenuhi jika $>0,6$.

Tabel 10
Composite Relabity dan Cronbatch Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbatch Alpha
Akuntabilitas (X1)	0,906	0,886
Transparansi (X2)	0,906	0,885
Kinera Keuangan Pemerintah (X3)	0,897	0,869
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Y)	0,909	0,887

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Uji Structural Model



Gambar 2
Inner Model
Sumber: Data primer diolah, 2020

Langkah pertama yang digunakan untuk menilai model dengan *Partial Least Square (PLS)* dapat dilihat dari *R-square* pada masing-masing variabel laten dependen. Tabel dibawah ini merupakan hasil dari estimasi *R-square* dengan menggunakan *Partial Least Square (PLS)*.

Tabel 11
Nilai R-Square

Variabel	Nilai R-square
Kinerja Keuangan Pemerintah (X3)	0,268
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Y)	0,26

Sumber: Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel diatas telah menunjukkan bahwa nilai dari *R-square* untuk variabel kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,268 dan untuk kinerja aparatur pemerintah desa sebesar 0,260.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dapat dilihat dengan *T-Statistics* juga dengan nilai *P-Values* < 0,05. Tabel dibawah ini merupakan hasil dari pada uji hipotesis yang dilakukan dengan melalui *inner model*.

Tabel 12
Path Coefficient

Variabel	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
AKT -> KAPD	0.242	0.254	0.086	2.819	0.005
TRS -> KAPD	0.059	0.057	0.085	0.693	0.488
AKT -> KKP	0.291	0.290	0.083	3.524	0.000
TRS -> KKP	0.335	0.351	0.085	3.934	0.000
KKP -> KAPD	0.325	0.322	0.090	3.632	0.000

Sumber: Sumber: Data primer diolah, 2020

Pengujian Hipotesis H₁ (Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa)

Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa sesuai dengan hipotesis pertama. Hasil pengujian membuktikan bahwa nilai dari koefisien jalur (original sampel) sebesar 0,242 dengan nilai t-statistik sebesar 2,819. Bahwa nilai tersebut lebih besar dari pada nilai t-tabel yaitu 1,981. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis 1 diterima.

Pengujian Hipotesis H₂ (Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa)

Pada pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hasil tersebut dibuktikan oleh nilai koefisien jalur (original sampel) sebesar 0,059 dengan nilai t-statistik 0,693. Dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 1,981. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua dimana transparansi mendorong kinerja aparatur pemerintah desa secara langsung. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis 2 ditolak.

Pengujian Hipotesis H₃ (Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah)

Hasil dari pengujian hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah sesuai dengan hipotesis ketiga. Hasil pengujian membuktikan bahwa nilai dari koefisien jalur (original sampel) sebesar 0,291 dengan nilai t-statistik sebesar 3,524. Bahwa nilai tersebut lebih besar dari pada nilai t-tabel yaitu 1,981. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis 3 diterima.

Pengujian Hipotesis H₄ (Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah)

Pengujian hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah sesuai dengan hipotesis

keempat. Hasil tersebut dibuktikan oleh nilai koefisien jalur (original sampel) sebesar 0,335 dengan nilai t-statistik 3,934. Dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,981. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis 4 diterima.

Pengujian Hipotesis H₅ (Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa)

Hasil dari pengujian hipotesis yang kelima menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa sesuai dengan hipotesis kelima. Hasil pengujian membuktikan bahwa nilai dari koefisien jalur (original sampel) sebesar 0,325 dengan nilai t-statistik sebesar 3,632. Dimana nilai tersebut lebih besar dari pada nilai t-tabel yaitu 1,981. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis hipotesis 5 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini menunjukkan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandari (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian dari Setyaningrum (2016) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas pada aparatur pemerintah desa maka semakin baik kinerja pemerintah tersebut, karena apabila semakin baik bentuk pertanggungjawabannya maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kerjanya

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa di Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerjanya semakin meningkat. Karena setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan juga laporan kinerja dengan cara mampu menjelaskan secara menyeluruh sesuai dengan hasil program maupun kegiatan yang telah terlaksana, sehingga semua pihak yang berkepentingan mampu menilai apakah pemerintah desa telah melaksanakan kerjanya dengan baik dan benar. Karena apa yang setiap direncanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai hasil yang baik serta maksimal dari suatu perencanaan tersebut yaitu dengan cara pertanggungjawaban atas pengelolaan pemerintahan yang dilakukan secara baik juga benar.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketidaksignifikannya hipotesis ini maka peneliti berasumsi bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih belum mampu sepenuhnya menerapkan transparansi, karena jika transparansi diterapkan dengan baik maka kinerja aparatur pemerintah desa juga akan semakin meningkat. Karena keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu dari wujud komitmen suatu pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dari itu dapat menciptakan pemerintah yang bersih juga akuntabel.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandari (2015) bahwa transparansi berpengaruh parsial terhadap kinerja aparatur pemerintah dan didukung oleh Setyaningrum (2016) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah, karena apabila semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah,

maka praktik penyelenggaraan pemerintah tersebut sudah dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian ini sependapat dengan penelitian sebelumnya yaitu dari Permana (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah dan didukung oleh penelitian dari Nasution (2018) akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Karena apabila semakin tinggi partisipasi publik, maka kinerja keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat.

Hall ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo dalam proses penerapan partisipasi publik cukup efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik di bidang keuangan maupun di bidang lain. Adanya kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat akan membangun rasa percaya dan menimbulkan peningkatan kinerja di segala aspek. Pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa partisipasi publik yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu berasal dari Permana (2015) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah dan sejalan oleh penelitian dari Nasution (2018). Hasil hipotesis untuk variabel transparansi yaitu transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan artinya dapat dilihat disini bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin pula proses pengawasan yang mengindikasikan akan meningkatkan kinerja keuangan dan juga pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam proses penyusunan APBD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, partisipasi masyarakat sudah dalam tahapan baik, artinya yaitu para aparatur sebelumnya telah memberikan informasi serta arahan kepada para masyarakat agar selalu meningkatkan partisipasinya. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan. Dapat dilihat disini bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin baik pula proses pengawasan yang mengindikasikan akan meningkatkan kinerja keuangan dan juga pengelolaan keuangan pemerintah yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa sesuai dengan hipotesis kelima. Penelitian ini sependapat dengan peneliti sebelumnya yang berasal dari (Maryati, *et al.*, 2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah berpengaruh parsial atau positif serta signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang ada di Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah desayang baik. Kinerja keuangan dapat membantu organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengevaluasi program-program serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Selain itu, kinerja keuangan juga ditetapkan melalui indikator-indikator sesuai dengan program. Indikator-indikator tersebut berupa standar untuk mengukur kinerja pelayanan

dan juga kepuasan yang sedang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Karena jika semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah maka akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keempat hipotesis yang diterima antara lain pertama, hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif serta signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini berarti bahwa sikap akuntabilitas internal perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik serta mampu meningkatkan pertanggungjawaban kinerja dari aparatur pemerintah desa. Kedua, yaitu hasil uji hipotesis H_3 menjelaskan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa sikap akuntabilitas internal perangkat desa telah mampu membangun rasa percaya terhadap masyarakat dengan tingginya partisipasi publik terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Keempat, hasil uji hipotesis H_4 menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang positif serta signifikan antara transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo telah mampu meningkatkan sikap partisipasi dari masyarakat karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin baik pula proses pengawasan yang mengindikasikan akan meningkatkan kinerja keuangan. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis H_5 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini ditunjukkan dengan para perangkat desa yang telah mampu melaksanakan tugasnya menyusun anggaran desa dengan baik, hal ini dilakukan dalam rapat pembahasan mengenai anggaran yang dilakukan perangkat desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan anggota BPD, serta diikuti oleh para tokoh masyarakat.

Hipotesis yang ditolak yaitu hasil uji hipotesis H_2 menunjukkan adanya hubungan yang tidak berpengaruh antara transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Karena transparansi yang diterapkan dalam organisasi pemerintah desa di Kabupaten Sidoarjo belum cukup baik sehingga banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan informasi menjamin pertanggungjawaban suatu pemerintah.

Saran

Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu: pertama, untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Kedua, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 30 desa dari 10 kecamatan wilayah bagian utara, barat, timur, selatan dari Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pada penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan memperbanyak sampel serta memperluas jumlah kecamatan dan juga kantor desa yang menjadi objek penelitian. Ketiga, bagi penelitiselanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, karena masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja aparatur pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M.R. 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD)). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Grobogan.
- Auditya, L.H. dan Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu*. 3. Bengkulu.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (suatu pengantar)*. Erlangga. Jakarta.
- Cavalluzzo, K.S. dan C.D. Ittner. (2004). "Implementing performance measurement innovations: evidence from government", *Accounting, Organizations and Society* 29: 243-267.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. *Modern Methods for Business Research*. 295-336.
- Donaldson, L. dan J. H. Davis. 1991. *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management* 16: 49-64.
- Dubnick, M. 2005. Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms. *Public Performance and Management Review* 28(3): 376-417.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2006. *Struktural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ismail, M., A.K. Widagdo., dan W. Agus. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323-340.
- Jensen, M.C., dan W.H Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership structure. *Journal of Financial Economics* 13: 305-360.
- Krina, P. 2003. *Indikator dana latukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mahoney, T.A. 2003. *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati. South Western Publishing.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maryati, S., Fachruzzaman, dan N. Aprila. 2013. Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*. 25-28 September: 3591-3597.
- Nasution.D.A.D. 2018. Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(3).
- Nico, A. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Bayumedia Publishing. Halaman 20. Malang.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 *Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

- Permana, I. A. 2015. Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Saputra, D.S., Darwanis., dan A. Syukuriy. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh). *Jurnal Akuntansi* 2302(0164): 76-84 Universitas Syiah Kuala. Aceh.
- Setyaningrum, I. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Wandari, I. D., Nyoman. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSA* 3(1).